

PANDUAN PEMANTAUAN & PENILAIAN KINERJA KOMISI IRIGASI (KOMIR)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Taman Makam Pahlawan No 20, Kalibata Jakarta Selatan 12750



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Juli 2018

Nomor : 660/3108/Bangda
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penyampaian Panduan

Yth. Daftar terlampir
di-
Tempat

Dalam rangka pengelolaan irigasi partisipatif untuk mendukung program ketahanan pangan, terlampir disampaikan panduan pelaksanaan kegiatan / program dimaksud yang terdiri dari:

1. Panduan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK)
2. Panduan Pemantauan dan Penilaian Kinerja Komisi Irigasi (KOMIR)
3. Panduan Pemberdayaan Masyarakat Petani Daerah Irigasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah,



Ir. Dian Indrajati, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Menteri Pertanian
4. Asian Development Bank

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor : 660/3108/Bangda

Tanggal : 5 Juli 2018

Kepala Daerah di:

1. Provinsi Aceh
 - Kabupaten Aceh Timur,
 - Kabupaten Aceh Besar
 - Kabupaten Aceh Utara
 - Kabupaten Bireuen
2. Provinsi Sumatera Utara
 - Kabupaten Asahan
 - Kabupaten Simalungun
 - Kabupaten Humbang Hasundutan
 - Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Provinsi Sumatera Barat
 - Kabupaten Pasaman
 - Kabupaten Pasaman Barat
 - Kabupaten Pesisir Selatan
 - Kabupaten Sijunjung
 - Kabupaten Limapuluh Koto
4. Provinsi Sumatera Selatan
 - Kabupaten Musi Rawas
 - Kabupaten Empat Lawang
 - Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 - Kabupaten Musi Banyuasin
 - Kabupaten Banyuasin
 - Kabupaten Muara Enim
 - Kabupaten Lahat
5. Provinsi Lampung
 - Kabupaten Pesawaran
 - Kabupaten Tulangbawang
 - Kabupaten Tanggamus
 - Kabupaten Mesuji
 - Kabupaten Lampung Tengah
6. Provinsi Banten
 - Kabupaten Pandeglang
 - Kabupaten Serang
7. Provinsi Jawa Barat
 - Kabupaten Ciamis
 - Kabupaten Sukabumi
 - Kabupaten Garut
 - Kabupaten Indramayu
 - Kabupaten Kuningan
 - Kabupaten Majalengka
 - Kabupaten Sumedang
8. Provinsi Jawa Tengah
 - Kabupaten Cilacap
 - Kabupaten Banyumas
 - Kabupaten Pekalongan
 - Kabupaten Banjarnegara
 - Kabupaten Kebumen

- Kabupaten Purworejo
- Kabupaten Pati
- 9. Provinsi Jawa Timur
 - Kabupaten Ngawi
 - Kabupaten Tuban
 - Kabupaten Bojonegoro
 - Kabupaten Madiun
 - Kabupaten Kediri
 - Kabupaten Lamongan
 - Kabupaten Jombang
 - Kabupaten Lumajang
 - Kabupaten Jember
- 10. Provinsi Kalimantan Barat
 - Kabupaten Sambas
 - Kabupaten Kubu Raya
 - Kabupaten Kayong Utara
 - Kabupaten Ketapang
- 11. Provinsi Kalimantan Selatan
 - Kabupaten Barito kuala
 - Kabupaten Tapin
 - Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - Kabupaten Tanah Bumbu
- 12. Provinsi Sulawesi Utara
 - Kabupaten Minahasa Selatan
 - Kabupaten Bolaang Mongondow
- 13. Provinsi Sulawesi Tengah
 - Kabupaten Toli-Toli
 - Kabupaten Poso
 - Kabupaten Banggai
- 14. Provinsi Sulawesi Selatan
 - Kabupaten Bone
 - Kabupaten Soppeng
 - Kabupaten Wajo
 - Kabupaten Pinrang
 - Kabupaten Sidenreng Rappang
- 15. Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Kabupaten Lombok Tengah
 - Kabupaten Lombok Timur
 - Kabupaten Bima
 - Kabupaten Dompu
- 16. Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - Kabupaten Manggarai Barat
 - Kabupaten Manggarai Timur

KATA PENGANTAR

Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan elemen utama dalam Program *Integrated Participatory Development Management of Irrigation Program* (IPDMIP). Hal tersebut bisa dicapai salah satunya melalui penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi. Salah satu unsur kelembagaan pengelolaan irigasi adalah Komisi Irigasi, selanjutnya kita sebut KOMIR.

KOMIR difungsikan sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif selain sebagai lembaga yang merencanakan dan menjalankan program pembangunan bidang irigasi dan pertanian.

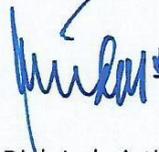
KOMIR sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IPDMIP dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi. Agar program berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka diperlukan evaluasi terhadap kinerja KOMIR. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, maka disusunlah buku panduan ini.

Lebih lanjut, buku panduan ini diharapkan mampu menjawab dan memberikan kemudahan bagi setiap pemangku kepentingan untuk menilai kinerja KOMIR dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian, diharapkan juga buku panduan ini dapat menjadi acuan bagi Daerah dalam rangka keberhasilan pencapaian tujuan program. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu penyusunan panduan ini. Akhirnya, semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat bagi implementasi program secara keseluruhan.

Jakarta, 05 Juli 2018

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

Plt. DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH



Ir. Diah Indrajati, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR LAMPIRAN.....	III
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Maksud dan Tujuan	1
I.3 Ruang Lingkup	2
I.4 Kerangka Pikir.....	2
BAB II METODOLOGI.....	3
II.1 Metode	3
II.2 Variabel dan Indikator Kinerja.....	3
II.3 Teknik Pengumpulan Data	5
II.4 Teknik Analisis Data	5
II.5 Teknik Pembahasan	5
BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN	6
III.1 Pemantauan.....	6
III.2 Penilaian	6
III.2.1 Persiapan	6
III.2.2 Pelaksanaan	7
III.2.3 Analisis dan Pembahasan.....	8
III.3 Pelaporan.....	8
III.4 Rencana Tindak Lanjut	9
BAB IV ORGANISASI PELAKSANA	10
IV.1 Struktur Organisasi	10
IV.2 Pembagian Tugas	11
BAB V PENUTUP.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Variabel Dan Indikator Utama Pemantauan Dan Penilaian Kinerja Komir.....	4
Tabel 2 Pembagian Tugas Kegiatan Pemantauan Dan Penilaian Kinerja Komir.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir Pemantauan dan Penilaian Kinerja	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Tim Pelaksana Pemantauan dan Penilaian Kinerja Komir	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Indikator Kinerja dan Proporsi Skor	15
Lampiran 2 Form Penilaian KOMIR Provinsi	16
Lampiran 3 Form Penilaian KOMIR Kabupaten.....	18
Lampiran 4 Kisi-kisi Program Kerja KOMIR	20
Lampiran 5 Outline Laporan Hasil Pemantauan dan Penilaian Kinerja KOMIR.....	21

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) merupakan salah satu kebijakan untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. PPSIP dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan secara partisipatif.

Sebagai satu kesatuan, sistem irigasi melibatkan banyak unsur, diantaranya Pemerintah Daerah, Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A), kelompok tani (Poktan/Gapoktan), dan pengguna jaringan irigasi lainnya. Kolaborasi dari unsur-unsur tersebut perlu dibangun dengan baik agar tujuan akhir sistem bisa tercapai. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran KOMIR sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. KOMIR merupakan bagian dari proses untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi.

Sebagai koordinator dari berbagai unsur, kapasitas dari KOMIR sendiri perlu diperkuat dan dijaga keberlanjutannya. Salah satunya dengan cara pemantauan dan evaluasi kinerjanya. Pemantauan dan penilaian kinerja perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana tugas pokok dan fungsinya berjalan sesuai ketentuan agar tetap berada dalam koridor menuju capaian akhir program.

Dalam program PPSIP, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, dilakukan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, termasuk KOMIR. Perubahan dimaksud berimplikasi pada kebutuhan akan pembaharuan prosedur pemantauan dan penilaian kinerjanya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan panduan penilaian kinerja KOMIR secara lebih detail yang diharapkan mampu menjawab dan memberikan kemudahan bagi setiap pemangku kepentingan untuk memantau dan menilai kinerja KOMIR.

I.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan panduan ini adalah membantu Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan yang tepat bagi tim dalam melakukan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota;
2. Memberikan metodologi yang dapat digunakan dalam menetapkan dan melaksanakan pemantauan dan penilaian KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota secara tepat;
3. Memberikan gambaran tahapan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota
4. Memberikan acuan komposisi tim pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota, termasuk pembagian kerjanya.

I.3 Ruang Lingkup

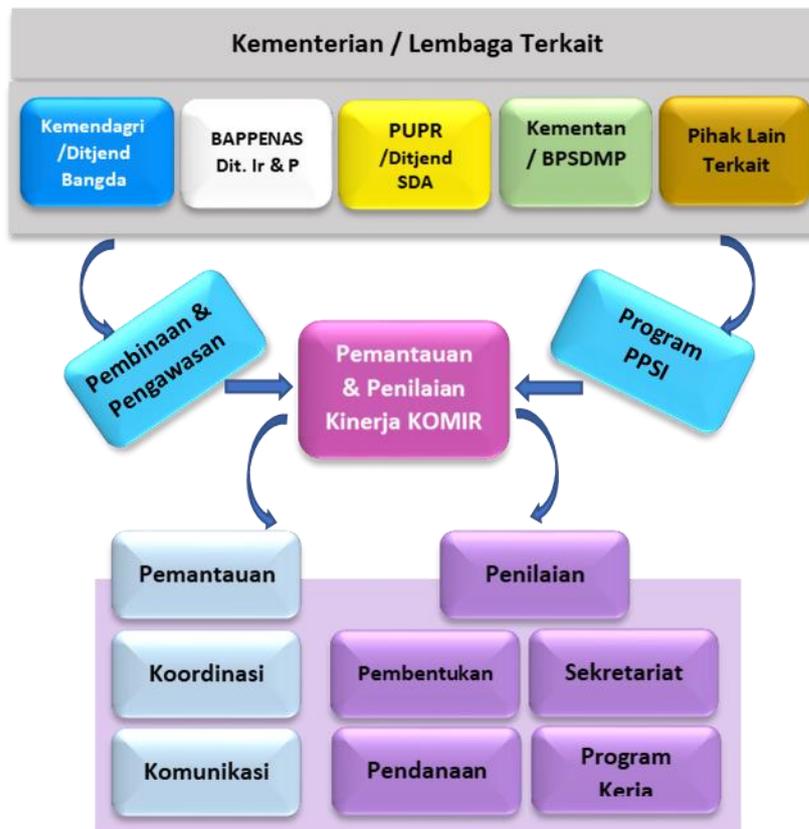
Ruang lingkup panduan ini dibatasi pada 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:

1. Tahapan Pelaksanaan, yang terdiri dari Pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan analisis dan pembahasan kegiatan dimaksud serta pelaporan yang diteruskan dengan rencana tindak lanjutnya.
2. Organisasi Pelaksana yang meliputi struktur organisasi pemantau dan penilai kinerja KOMIR serta pembagian tugasnya.

I.4 Kerangka Pikir

Pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota merupakan alat manajemen yang digunakan oleh Pemerintah terkait dan pihak lainnya dalam melakukan proses pengawasan terhadap fungsi koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota, dan penilaian terhadap kinerja tugas pokok KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota baik pada aspek optimalisasi potensi sumber daya, sekretariat, program dan hasil kerja (rumusan rekomendasi, keputusan kebijakan, dan pelaporan), dan pendanaan Kelembagaan. Secara umum proses pemantauan dan penilaian KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota dijelaskan melalui kerangka pikir sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Kerangka Pikir Pemantauan dan Penilaian Kinerja KOMIR



BAB II METODOLOGI

II.1 Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dilakukan dengan menggabungkan berbagai strategi, diantaranya adalah gabungan antara metode dokumentasi dan survei yang dilengkapi dengan metode observasi. Metode Focuss Group Discussion (FGD) juga dapat dilaksanakan untuk melengkapi data dan informasi yaitu dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para *stakeholders*. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui *cross check* data dan informasi dari berbagai sumber.

Metode penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota adalah penilaian cepat secara partisipatif (*participatory rapid assessment*). Dalam konteks penilaian kinerja KOMIR, metode melibatkan unsur-unsur anggota KOMIR tersebut. Metode tersebut umumnya dapat diselesaikan dalam 2 (dua) minggu atau kurang yang meliputi kegiatan di lapangan dan di kantor dengan asumsi bahwa beberapa data pendukung telah siap tersedia sebelum pelaksanaan penilaian cepat secara partisipatif tersebut dilakukan.

Indikator-indikator kinerja utama dari penilaian cepat secara partisipatif dapat membantu penyusunan persepsi dan fakta, sehingga memudahkan pengambilan keputusan tentang potensi yang tersedia, mengetahui kelemahan operasional kinerja (manajemen, sumber daya, dan perangkat kerasnya), sehingga tindakan-tindakan spesifik yang diambil dapat memperbaiki kinerja KOMIR pada masa mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu kunci utama dari penilaian cepat secara partisipatif adalah penetapan variabel dan indikator kinerja.

II.2 Variabel dan Indikator Kinerja

Pada dasarnya terdapat dua tipe variabel kinerja, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Variabel kinerja kuantitatif secara umum lebih objektif berdasarkan angka-angka. Sedangkan variabel kinerja kualitatif diperlukan untuk menilai kinerja organisasi yang tidak cukup hanya berdasarkan angka-angka. Dalam konteks penilaian kinerja KOMIR, penentuan variabel kinerja menggunakan pendekatan kuantitatif yang digabung dengan pendekatan kualitatif untuk mendukung sejumlah data yang bersifat angka-angka dengan penjelasan kualitatif, termasuk permasalahan yang ditemukan dalam prosesnya.

Berdasarkan kebutuhan dan hasil diskusi dan pembahasan konsep indikator kinerja KOMIR diantara berbagai pihak terkait (Bappenas, Bangda, Ditjend Irigasi, Ditjend OP, Konsultan), maka ditetapkan secara operasional penilaian kinerja KOMIR provinsi dan KOMIR kabupaten/kota melalui 3 (tiga) variabel utama, yaitu:

1. Pembentukan;
2. Sekretariat; dan
3. Pendanaan.

Masing-masing variabel tersebut dioperasionalkan melalui parameter dan indikator yang relevan sebagaimana terlihat pada **Tabel 2.1** sebagai berikut.

Tabel 1 Variabel dan Indikator Utama Pemantauan dan Penilaian Kinerja KOMIR

Variabel	Parameter	Indikator
I. Pembentukan	1. Legalisasi Pembentukan KOMIR dan Sekretariat	a. KOMIR ditetapkan Gubernur/Bupati b. Sekretariat Komir ditetapkan Ketua Harian
	2. Struktur Organisasi	c. KOMIR d. Sekretariat Komir
	3. Keanggotaan	e. Perwakilan Pemerintahan Daerah f. Perwakilan P3A/GP3A/IP3A g. Perwaklan Pengguna Irigasi Lainnya h. Perwakilan KOMIR Kabupaten (untuk KOMIR Provinsi) i. Proporsi Jumlah Anggota berasal dari Pemerintah dan Non Pemerintah j. Proporsi Anggota Perempuan
II. Sekretariat	4. Tenaga Pelaksana	k. Staf Pelaksana l. Kapasitas Staf Sekretariat
	5. Program Kerja	m. Rencana Kerja n. Realisasi
	6. Pelaksanaan Tugas	o. Fasilitas/Dukungan Tupoksi KOMIR p. Fasilitas Penyediaan Tenaga Ahli/Nara Sumber/Pakar
	7. Hasil Kerja Sekretariat	q. Fasilitas Rapat r. Koordinasi s. Notulen Rapat t. Laporan & Rekomendasi KOMIR
	8. Fasilitas Pendukung	u. Ruang Kerja Sekretariat v. Kelengkapan Pendukung Lainnya
III. Pendanaan	9. Operasional	w. Biaya Operasional KOMIR dari APBD x. Biaya Operasional Sekretariat KOMIR dari APBD
	10. Pertanggungjawaban Anggaran	y. Laporan Pertanggung jawaban
3 Variabel	10 Parameter	25 Indikator

Secara umum, pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi Dan KOMIR Kabupaten/Kota meliputi 3 variabel utama, 10 parameter pendukung, dan 25 indikator kinerja utama.

Bobot skor pada setiap indikator penilaian ditentukan sesuai dengan tingkat kepentingan kinerja terhadap KOMIR dengan perbandingan Pembentukan (30%) Sekretariat (40%) dan Pendanaan (30%) sebagaimana dapat dilihat pada lampiran.

Selain dari penilaian berdasarkan 3 variabel diatas, informasi terkait kinerja KOMIR lainnya maupun permasalahan yang terjadi dapat dicatat di format terpisah sebagai data pendukung (tambahan) seperti: (1). Pembentukan, melibatkan unsur perguruan tinggi maupun LSM, dan lain sebagainya (2). Sekretariat, memiliki ruang rapat sendiri,

Koordinasi dengan pihak lain selain pada saat rapat koordinasi, dan lain sebagainya (3).
Pendanaan, mendapatkan sumber pendanaan selain APBD.

II.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi gabungan dari teknik dokumentasi, survey, observasi, wawancara/FGD, dan kuesioner dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dokumentasi diperoleh dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan/semesteran/bulanan.
2. Metode survei dengan tujuan untuk menjaring data dari para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran.
3. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dan fakta yang berhubungan dengan masalah kinerja KOMIR dengan melihat, mendengarkan, dan mengamati secara langsung.
4. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan yang dilakukan dengan sumber informasi terpercaya dan relevan.
5. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan secara tertulis dengan bentuk pertanyaan tertutup.

II.4 Teknik Analisis Data

Pengolahan data diperlukan untuk mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna, kemudian dianalisis untuk mengkaji data. Teknik analisis data yang sesuai dengan konteks penilaian kinerja KOMIR adalah dengan menggunakan model matriks untuk penyusunan data dan fakta, kemudian didukung oleh teknik komparasi dengan cara membandingkan atau menilai kinerja organisasi tertentu. Teknik analisis tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis kuantitatif, yaitu suatu cara analisis berdasarkan fakta dan data yang aktual. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk mendukung hasil data yang dianalisis secara kuantitatif berdasarkan kebutuhannya sesuai fakta-fakta empiris berupa sejumlah keterangan baik lisan maupun tulisan.

II.5 Teknik Pembahasan

Teknik pembahasan merupakan langkah selanjutnya setelah proses analisis data dilakukan. Data hasil penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota kemudian dibahas berdasarkan aspek variabel yang ditetapkan yang mengarah pada kondisi tertentu sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh pada saat pengumpulan data. Setiap indikator yang ada pada masing-masing variabel ditelaah melalui proses review sederhana sehingga memberikan informasi yang lebih bermakna. Pada bagian akhir tahap pembahasan ini ditentukan tolak ukur penilaian yang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok penilaian dengan skala 0 – 100 tingkat kinerja KOMIR sebagai berikut:

1. KOMIR dengan nilai skor $N \leq 50$ berada pada kategori Kinerja Kurang Baik;
2. KOMIR dengan nilai skor $51 \leq N \leq 75$ berada pada kategori Kinerja Cukup; dan
3. KOMIR dengan nilai skor $76 \leq N < 100$ berada pada kategori Kinerja Baik.

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN

III.1 Pemantauan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PUPR No 17 tahun 2015 tentang KOMIR, salah satu tugas KOMIR Provinsi maupun KOMIR Kabupaten/Kota adalah melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur maupun Bupati/Walikota, mengenai program, progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. Dalam Kontek pemantauan ini, dan sesuai PP.12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi, kabupaten/kota, yang diantaranya adalah program pengembangan dan pengelolaan irigasi (PPSI). Bappeda selaku Ketua KOMIR dapat melakukan pemantauan kinerja KOMIR secara internal, dan melaksanakan proses lebih lanjut atas persoalan yang terjadi, melalui kegiatan seperti: rapat koordinasi, proses pendalaman melalui survey dan observasi lapangan sehingga diperoleh data yang lebih lengkap untuk selanjutnya disusun program kerja, dan rencana tindak lanjut yang lebih detail. Dengan proses ini maka pembinaan dan pengawasan pihak pemerintah pusat dan provinsi akan terbantu untuk upaya tindak lanjut.

III.2 Penilaian

Penilaian kinerja dalam konteks ini adalah penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan oleh Tim Pusat yang dikoordinir oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Tahapan pemantauan dan penilaian kinerja yang akan dilaksanakan meliputi:

III.2.1 Persiapan

Persiapan kegiatan yang diperlukan dalam melaksanakan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR meliputi:

1. Pertemuan koordinasi. Kegiatan ini diperlukan untuk menyamakan persepsi tentang kebutuhan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota. Selain itu juga dibahas penjelasan materi dan pemantapan tim pemantauan dan evaluasi, termasuk penganggaran kegiatannya. Peserta yang terlibat dalam pertemuan koordinasi tersebut dapat berasal dari unsur:
 - a. Kementerian Terkait (Kemendagri, KemenPUPR, Kementan, Bappenas, dan kementerian lainnya sesuai kebutuhan).
 - b. Pemangku kepentingan terkait lainnya.
 - c. Konsultan

Pelaksana kegiatan pertemuan koordinasi dapat di fasilitasi oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sekurang-kurangnya seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota dengan waktu pertemuan koordinasi sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu.

2. Pembahasan Instrumen. Kegiatan ini merupakan penjelasan materi pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota kepada tim pelaksana sebagai pembekalan tim sebelum kegiatan pengumpulan data di setiap lokasi yang dituju.
3. Penentuan Tim Pelaksana Pemantauan dan Penilaian Kinerja. Kegiatan ini dilakukan untuk mengondisikan struktur organisasi pelaksana pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota. Selain itu juga dilakukan pembagian peran dan tugas kegiatan yang harus dilakukan pada saat pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota.
4. Penetapan Jadwal Pemantauan dan Evaluasi. Bagian selanjutnya dari kegiatan persiapan adalah menetapkan jadwal kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota. Agendanya selain menetapkan Provinsi dan Kabupaten, tim pelaksana, dan waktunya, juga dibahas kesiapan surat pengantar kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota partisipan program PPSIP yang menjadi lokasi pemantauan dan penilaian.
5. Rencana Analisis dan Pembahasan Data Hasil Pemantauan dan Penilaian Kinerja KOMIR. Bagian terakhir dari kegiatan persiapan adalah membahas rencana analisis dan pembahasan data hasil kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota. Hal ini penting dilakukan agar data yang terkumpul dapat dengan mudah dikelompokkan berdasarkan kebutuhan analisis dan pembahasan melalui model matriks yang sudah disiapkan sebelumnya.

III.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penilaian Kinerja KOMIR Provinsi Dan KOMIR Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang diperlukan pada lokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota partisipan. Proses kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan awal. Kegiatan pertemuan awal diperlukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan tim pelaksana pemantauan dan penilaian kinerja kepada pemangku kepentingan terkait di daerah (Bappeda, OPD PU, OPD Pertanian, KOMIR setempat, dan P3A/GP3A/IP3A). Pertemuan ini dapat dilaksanakan di ruang rapat KOMIR Provinsi/Kabupaten/Kota atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan mengundang pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait dengan KOMIR di daerah.
2. Wawancara dan pengisian instrumen. Kegiatan ini dilakukan bersama narasumber (responden) KOMIR setempat (bisa ketua maupun anggotanya). Secara operasional, kegiatan ini sebaiknya dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan pengumpulan data, yaitu (1) pengisian instrumen yang sudah disediakan selama beberapa waktu sesuai kebutuhan. Pada bagian ini juga diberi kesempatan kepada responden untuk bertanya jika ada item pertanyaan yang masih kurang jelas; dan (2) wawancara terhadap isu-isu penting berkaitan dengan kinerja KOMIR di daerah melalui FGD yang dipimpin oleh Ketua Tim Pemantauan dan Penilaian Kinerja dan difasilitasi oleh pejabat daerah setempat sebagai moderator.
3. Observasi ke lokasi daerah irigasi dan atau kunjungan pertemuan dengan P3A/GP3A/IP3A sesuai kebutuhan. Setelah kegiatan pengumpulan data melalui instrumen dan wawancara selesai, maka dilakukan observasi lapangan dengan

mengunjungi beberapa daerah irigasi sesuai kewenangan pemerintah daerah setempat dan bertemu dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) pada daerah irigasi setempat untuk pendalaman kinerja KOMIR terkait dengan permasalahan di lapangan yang berhubungan dengan rencana alokasi air maupun rencana pola dan tata tanam yang disepakati bersama.

III.2.3 Analisis dan Pembahasan

Bagian yang tidak kalah pentingnya dengan pengumpulan data adalah analisis dan pembahasan. Analisis data dilakukan oleh masing-masing tim pelaksana pemantauan dan penilaian kinerja setelah kegiatan pengumpulan data selesai di lapangan. Analisis data dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pengelompokan data berdasarkan sifatnya (kuantitatif dan kualitatif).
2. Data yang bersifat kuantitatif dibuat teknik tabulasi data untuk menentukan skor yang diperoleh dari setiap jawaban, kemudian dilakukan penjumlahan untuk memastikan hasil penilaian kinerja termasuk pada kelompok tertentu yang sudah ditetapkan (kinerja kurang baik, cukup, dan baik).
3. Data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan model matriks permasalahan dan isu lainnya sesuai konteks dan kebutuhan pembahasan.
4. Kedua data (kuantitatif dan kualitatif) kemudian disandingkan untuk membandingkan kondisi kinerja tertentu dengan isu dan permasalahan yang diperoleh. Proses ini untuk meningkatkan ketajaman analisis data yang dikumpulkan di lapangan.

Hasil konsolidasi data tersebut menjadi bahan pembahasan selanjutnya untuk memaknai informasi yang terkandung dalam data tersebut serta penarikan kesimpulan dan rekomendasi kondisi kinerja KOMIR. Pembahasan hasil analisis data sebaiknya didasarkan pada setiap aspek atau variabel yang dikaji untuk pendalaman lebih lanjut, yaitu:

1. Pembahasan dan review kondisi potensi sumber daya KOMIR setempat;
2. Pembahasan dan review kondisi sekretariat KOMIR setempat; beserta program dan hasil kerja KOMIR
3. Pembahasan dan review Pendanaan KOMIR setempat.

III.3 Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota akan menjadi lebih efektif apabila ditunjang oleh sistem pelaporan kegiatan yang baik. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR adalah sebagai berikut :

1. Penentuan sistematika pelaporan kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR.
2. Teknis pelaporan menggunakan format laporan utama yang dilampirkan dengan beberapa data/dokumen penunjang.
3. Hasil pelaporan kegiatan disampaikan kepada Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait lainnya baik di tingkat Pusat, maupun pihak terkait lainnya.

Secara umum format laporan sedikitnya memuat kerangka laporan sebagaimana dapat dilihat pada lampiran.

III.4 Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota dilakukan antara lain untuk meningkatkan kinerja manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KOMIR. Oleh karena itu hasil kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR perlu segera disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan dibahas dalam rapat Koordinasi di tingkat Pusat untuk kemudian ditindaklanjuti melalui pembahasan secara terpadu dengan berbagai pihak terkait untuk mengambil keputusan tindakan korektif bagi peningkatan kinerja KOMIR pada masa mendatang. Proses pengambilan keputusan sebaiknya didasarkan pada beberapa aspek variabel dan indikator utama yang dinilai, serta didukung oleh informasi lainnya yang terkait.

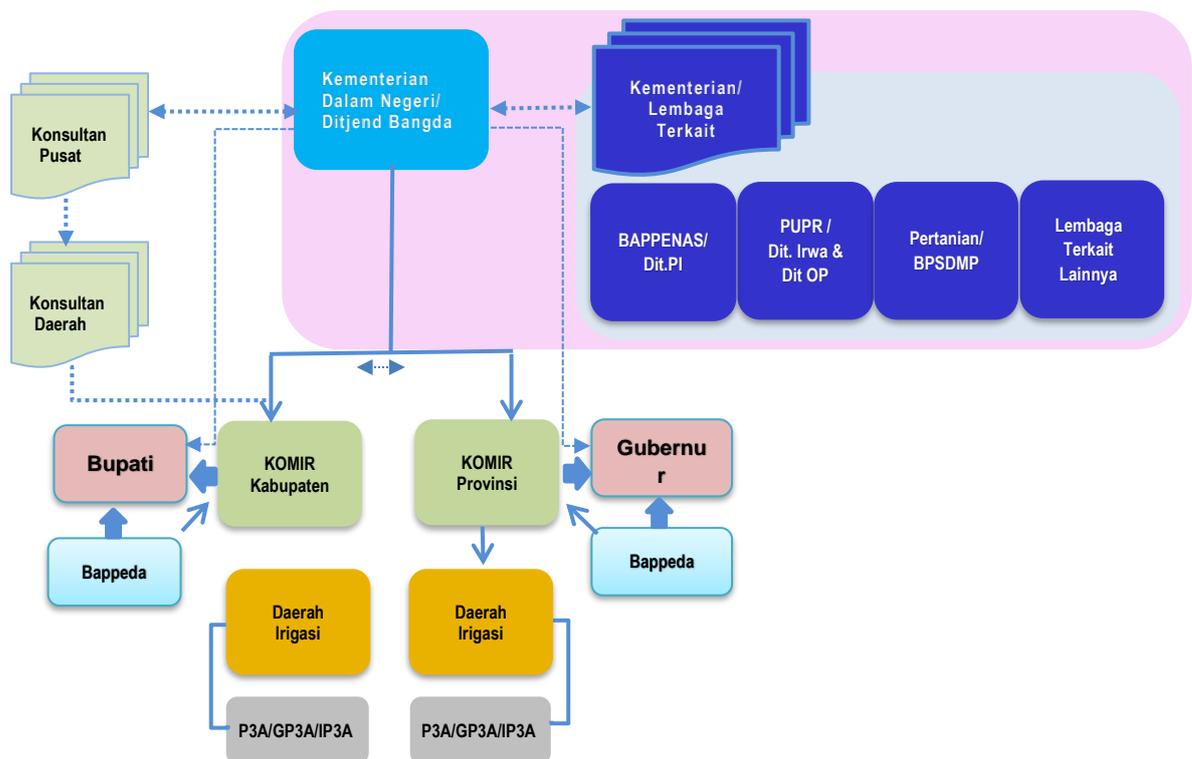
BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

IV.1 Struktur Organisasi

Pelaksana kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota di tim Pusat adalah unit pembina dari kementerian terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini adalah Ditjen Bina Bangda, yang bertindak selaku Koordinator, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian/lembaga terkait lainnya. Secara operasional, pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR dapat dibantu oleh konsultan program maupun dari Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang kompeten dalam pemantauan independen.

Adapun gambaran umum struktur organisasi tim pelaksana pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi Dan KOMIR Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh tim Pusat adalah seperti digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 2 Struktur Organisasi Tim Pelaksana Pemantauan dan Penilaian Kinerja KOMIR.



Keterangan:

- Garis Pemantauan & Penilaian
- Garis Koordinasi
- Garis Pelaporan

IV.2 Pembagian Tugas

Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR Provinsi dan KOMIR Kabupaten/Kota secara umum terbagi dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan instrumen, termasuk pemantapan metodologi pelaksanaan dan uji coba instrumen yang akan digunakan.
2. Kegiatan pemantauan dan penilaian melalui pengumpulan data lapangan.
3. Kegiatan analisis, pembahasan, dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR tersebut, maka dapat dilakukan pembagian peran/tugas pada tingkat pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Koordinator di Pusat berperan dalam menyusun panduan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR dan melakukan inisiasi pertemuan koordinasi baik persiapan, pelaksanaan, analisis dan pembahasan, serta pelaporan kegiatan pemantauan dan penilaian. Sedangkan koordinator di daerah berperan dalam menyiapkan pertemuan awal kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR, termasuk pemilihan lokasi observasi di daerah irigasi dan perkumpulan petani pemakai air tertentu.
2. Narasumber di Pusat berperan dalam memberikan arahan serta pengembangan terhadap substansi pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR. Sedangkan narasumber di daerah berperan dalam melaksanakan tugas pengisian formulir isian (instrumen) dan memberikan informasi pada saat wawancara sesuai kebutuhan.
3. Penelaah, berperan dalam melaksanakan kegiatan penelaahann (review) hasil laporan kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR yang dikaitkan dengan perencanaan dengan memberikan justifikasi dan pendapat hasil laporan yang diikuti usulan perbaikan program dalam meningkatkan kinerja KOMIR pada masa mendatang.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembagian tugasnya dapat dilakukan sebagai berikut (Tabel 2).

Tabel 2 Pembagian Tugas Kegiatan Pemantauan dan Penilaian Kinerja KOMIR

Lokus	Institusi	Fungsi	Tugas	Keterangan
Pusat	Kemendagri/Ditjend Bina Bangda/Unit Kerja Terkait	Koordinator	– Menyusun Panduan Pemantauan dan Penilaian Kinerja – Melaksanakan Pemantauan dan Penilaian – Menyampaikan Laporan Hasil Kepada Tim Pusat dan Daerah	Dalam pelaksanaan ini dapat dibantu oleh Konsultan
	Bappenas, Kemen PUPR/Ditjen SDA,	Nara Sumber	– Memberikan masukan dan Kinerja KOMIR & Permasalahan	

Lokus	Institusi	Fungsi	Tugas	Keterangan
	Kementan, (Kerja Terkait) dan Kons	Penelaah	– Memberikan justifikasi dan masukan hasil laporan	
Provinsi	Bappeda	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> – Memfasilitasi Pertemuan di Provinsi – Mengkoordinir tim di Level OPD Propinsi – Menyampaikan Hasil Pemantauan Kinerja KOMIR kepada Tim Pusat (apabila sudah melaksanakan) – Menyiapkan Lokasi/Daerah Irigasi untuk survey 	Dalam hal ini dapat dibantu oleh Konsultasn
	Dinas PU-SDA, Dinas Pertanian	Nara Sumber	– Memberikan Masukan	
		Penelaah	– Memberikan Justifikasi dan Pendapat atas Laporan Hasil	Daerah sebaiknya juga mendapat Laporan, sehingga dapat menyusun rencana tindak lanjut bersama KOMIR
	KOMIR Provinsi	Nara Sumber/ Responden	– Memberikan informasi dan Mengisi formulir penilaian secara akurat.	Melaksanakan rencana tindak hasil rekomendasi penilaian
Kabupaten	Bappeda	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> – Memfasilitasi Pertemuan – Mengkoordinir tim di Level OPD Kabupaten – Menyampaikan Hasil Pemantauan KOMIR kepada Tim Pusat (apabila sudah melaksanakan) – Menyiapkan Daerah Irigasi untuk survey 	Dalam hal ini dapat dibantu oleh Konsultasn
			Dinas PU-SDA, Dinas Pertanian	Nara Sumber
		Penelaah	– Memberikan Justifikasi dan Pendapat atas Laporan Hasil	Daerah sebaiknya juga mendapat Laporan, sehingga dapat menyusun rencana tindak

Lokus	Institusi	Fungsi	Tugas	Keterangan
				lanjut bersama KOMIR
	KOMIR Kabupaten	Nara Sumber/ Responden	– Memberikan informasi dan Mengisi formulir penilaian secara akurat.	Melaksanakan rencana tindak hasil rekomendasi penilaian
Daerah Irigasi	P3A/GP3A/IP3A	Nara sumber	– Memberikan masukan dan informasi tentang keberadaan dan kinerja KOMIR	

BAB V PENUTUP

Pemantauan dan penilaian kinerja KOMIR merupakan proses yang strategis untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tugas pokoknya telah dilaksanakan, termasuk menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi dijalankan oleh KOMIR di daerah. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah adanya sejumlah informasi mengenai kondisi dan hasil kinerja KOMIR Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan berbagai kriteria berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Hasil kegiatan ini menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan perbaikan kinerja KOMIR pada masa mendatang. Panduan ini dapat dijadikan referensi dalam proses pengembangan lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran kinerja KOMIR baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi sebuah lembaga koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dalam mendukung implementasi kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di daerah.

Lampiran 1 Indikator Kinerja dan Proporsi Skor

Variabel	Parameter	Indikator	Bobot Skoring	
			Sub	Tot.
I. Pembentukan	1. Legalisasi Pembentukan Komir dan Sekretariat	a. KOMIR ditetapkan Bupati /Gubernur b. Sekretariat Komir ditetapkan Ketua Harian	8	30
	2. Struktur Organisasi	c. KOMIR d. Sekretariat Komir	6	
	3. Keanggotaan	e. Perwakilan Pemerintahan Daerah f. Perwakilan P3A/GP3A/IP3A g. Perwaklan Pengguna Irigasi Lainnya h. Perwakilan KOMIR Kabupaten i. Proporsi Jumlah Anggota berasal dari Pemerintah dan Non Pemerintah j. Proporsi Anggota Perempuan	16	
II. Sekretariat	4. Tenaga Pelaksana	k. Staf Pelaksana l. Kapasitas Staf Sekretariat	8	40
	5. Program Kerja	m. Rencana Kerja n. Realisasi	8	
	6. Pelaksanaan Tugas	o. Fasilitasi/Dukungan Tupoksi KOMIR p. Fasilitas Penyediaan Tenaga Ahli/Nara Sumber/Pakar	6	
	7. Hasil Kerja Sekretariat	q. Fasilitasi Rapat r. Notulen Rapat s. Koordinasi t. Laporan Kerja & Rekomendasi KOMIR	12	
	8. Fasilitas Pendukung	u. Ruang Kerja Sekretariat v. Kelengkapan Pendukung Lainnya	6	
III. Pendanaan	9. Operasional	w. Biaya Operasional KOMIR dari APBD x. Biaya Operasional Sekretariat KOMIR dari APBD	20	30
	10. Pertanggungjawaban Anggaran	y. Laporan Pertanggung jawaban	10	
3 Variabel	10 Parameter	25 Indikator	100	100

Lampiran 2 Form Penilaian KOMIR Provinsi

INSTRUMEN PENILAIAN KOMISI IRIGASI (KOMIR)						
PROVINSI - PROGRAM IPDMIP						
Nama Provinsi		:				
Jumlah DI dan Luas Areal (total)		: DI, Ha				
a. Kewenangan Kab./Kota		: DI, Ha				
b. Kew. Provinsi (dalam Kab/Kota)		: DI, Ha				
c. Kew. Pusat (dalam Kab/Kota)		: DI, Ha				
Tanggal Monitoring dan Evaluasi		:				
No.	Variabel/Parameter/Indikator	Penilaian		Nilai		Nilai Sub Total
		Max	Nilai			Max
						30,00
I	PEMBENTUKAN					
1.	Legalisasi Pembentukan Komir dan sekretariat					
a.	Komis Irigasi ditetapkan Gubernur	belum	proses	sudah		
		0,00	2,00	4,00	4,00	
b.	Sekretariat Komir ditetapkan Ketua Harian	belum	proses	sudah		
		0,00	2,00	4,00	4,00	
2.	Struktur Organisasi					
a.	Komis Irigasi	belum	proses	sudah		
		0,00	2,00	3,00	3,00	
b.	Sekretariat Komir	belum	proses	sudah		
		0,00	2,00	3,00	3,00	
3.	Keanggotaan					
a.	Perwakilan Pemerintah Kabupaten (SKPD Terkait)	tidak ada		ada		
		0,00		3,00	3,00	
b.	Perwakilan P3A/GP3A/IP3A	tidak ada		ada		
		0,00		3,00	3,00	
c.	Perwakilan Pengguna Jasa Irigasi Lainnya	tidak ada		ada		
		0,00		2,00	2,00	
d.	Perwakilan dari KOMIR Kabupaten	tidak ada		ada semua		
		0,00		2,00	2,00	
e.	Proporsi Jumlah Anggota Unsur Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah	Tidak seimbang		seimbang		
		0,00		3,00	3,00	
f.	Proporsi Jumlah Anggota Perempuan	Tidak ada	10 - 30%	>30%		
		0,00	2,00	3,00	3,00	
						Jika tidak ada PT maka max nilai 29
II	SEKRETARIAT					Max
1.	Tenaga Pelaksana					40,00
a.	Jumlah Staf Sekretariat	tidak ada	≤ 2 orang	> 2 orang		
		0,00	2,00	4,00	4,00	
b.	Kapasitas Staf Sekretariat	Tidak mampu	cukup mampu	mampu		
		0,00	2,00	4,00	4,00	
2.	Program Kerja KOMIR					
a.	Rencana Kerja KOMIR	tidak ada	a) atau b) saja	a) dan b)		
	(a) Tahunan : b) Lima Tahunan)	0,00	2,00	4,00	4,00	
b.	Jika ada berapa Realisasi Program Kerja Tersebut	Belum ada	ada 10 - 50%	> 60%		
		0,00	2,00	4,00	4,00	
3.	Pelaksanaan Tugas Sekretariat					
a.	Fasilitasi / Dukungan Tugas dan Fungsi Komir (ATK, Jaringan Internet/Wifi, Furniture, White Board, Peta)	tidak ada		ada		
		0,00		3,00	3,00	
b.	Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli / Pakar / Narasumber	tidak ada		ada		
		0,00		3,00	3,00	
4.	Hasil Kerja Sekretariat					
a.	Fasilitasi Rapat Kerja	tidak ada	1-2 x setahun	> 2 x setahun		
		0,00	1,00	3,00	3,00	
b.	Notulen Rapat Kerja	tidak ada	ada tidak lengkap	Lengkap		
		0,00	1,00	2,00	2,00	
c.	Rekomendasi KOMIR	tidak ada		ada		
		0,00		4,00	4,00	
d.	Koordinasi Dengan Pihak Terkait	tidak ada		ada		
		0,00		2,00	2,00	
5.	Fasilitas Pendukung					
a.	Ruang Kerja Sekretariat	tidak ada		Ada		
		0,00		4,00	4,00	
b.	Kelengkapan Pendukung Lainnya (Peralatan minum, jam dinding, penanggalan, dll)	tidak ada		lengkap		
		0,00		3,00	3,00	
III.	PENDANAAN					Max
1.	Operasional					30,00
a.	Biaya Operasional KOMIR dari APBD (Honor Pengurus, Kunlap, dll)	tidak ada	kurang	memadai		
		0,00	5,00	15,00	15,00	
b.	Biaya Operasional Sekretariat KOMIR : (Rapat, Listrik, ATK, Komunikasi, Air minum, DLL)	tidak ada	kurang	memadai		
		0,00	2,00	5,00	5,00	
2.	Pertanggungjawaban Anggaran					
a.	Laporan Pertanggung Jawaban	tidak ada	ada, hanya untuk pengurus	ada&disampaikan kpd seluruh Anggota		
		0,00	5,00	10,00	10,00	
		Total Skor Maksimal				100
		Hasil Skor Penilaian				
		Kategori Hasil Penilaian: a. Skor 71 < N < 100				Baik
		b. Skor 51 ≤ N ≤ 70				Cukup
		c. Skor 1 ≤ N ≤ 50				Kurang
NAMA RESPONDEN (Perwakilan Komir)				NAMA ENUMERATOR		
()				()		
Cat: Daftar Hadir Responden FGD terlampir						

Lampiran 3 Form Penilaian KOMIR Kabupaten

INSTRUMEN PENILAIAN KOMISI IRIGASI (KOMIR) KABUPATEN - PROGRAM IPDMIP							
	Nama Kabupaten	:					
	Jumlah DI dan Luas Areal (total)	: DI, Ha					
	a. Kewenangan Kab./Kota	: DI, Ha					
	b. Kew. Provinsi (dalam Kab/Kota)	: DI, Ha					
	c. Kew. Pusat (dalam Kab/Kota)	: DI, Ha					
	Tanggal Monitoring dan Evaluasi	:					
No.	Variabel/Parameter/Indikator				Penilaian		Nilai Sub Total
					Max	Nilai	
I	PEMBENTUKAN						Max
	1. Legalisasi Pembentukan Komir dan sekretariat						30,00
	a. Komisi Irigasi ditetapkan Bupati	belum	proses	sudah			
		0,00	2,00	5,00	5,00		
	b. Sekretariat Komir ditetapkan Ketua Harian	belum	proses	sudah			
		0,00	2,00	4,00	4,00		
	2. Struktur Organisasi						
	a. Komisi Irigasi	belum	proses	sudah			
		0,00	2,00	3,00	3,00		
	b. Sekretariat Komir	belum	proses	sudah			
		0,00	2,00	3,00	3,00		
	3. Keanggotaan						
	a. Perwakilan Pemerintah Kabupaten (SKPD Terkait)	tidak ada		ada			
		0,00		3,00	3,00		
	b. Perwakilan P3A/GP3A/IP3A	tidak ada		ada			
		0,00		3,00	3,00		
	c. Perwakilan Pengguna Jasa Irigasi Lainnya	tidak ada		ada			
		0,00		3,00	3,00		
	e. Proporsi Jumlah Anggota Unsur Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah	Tidak seimbang		seimbang			
		0,00		3,00	3,00		
	f. Proporsi Jumlah Anggota Perempuan	Tidak ada	10 - 30%	>30%			
		0,00	2,00	3,00	3,00		
II	SEKRETARIAT						Max
	1. Tenaga Pelaksana						40,00
	a. Jumlah Staf Sekretariat	tidak ada	≤ 2 orang	> 2 orang			
		0,00	2,00	4,00	4,00		
	b. Kapasitas Staf Sekretariat	Tidak mampu	cukup mampu	mampu			
		0,00	2,00	4,00	4,00		
	2. Program Kerja KOMIR						
	a. Rencana Kerja KOMIR						
	(a)Tahunan : b) Lima Tahunan)	tidak ada	a) atau b) saja	a) dan b)			
		0,00	2,00	4,00	4,00		
	b. Jika ada berapa Realisasi Program Kerja Tersebut	Belum ada	ada 10 - 50%	> 60%			
		0,00	2,00	4,00	4,00		
	3. Pelaksanaan Tugas Sekretariat						
	a. Fasilitas / Dukungan Tugas dan Fungsi Komir (ATK,Jaringan Internet/Wifi, Furniture, White Board, Peta	tidak ada		ada			
		0,00		3,00	3,00		
	b. Fasilitas Penyediaan Tenaga Ahli / Pakar / Narasum-	tidak ada		ada			
		0,00		3,00	3,00		
	4. Hasil Kerja Sekretariat						
	a. Fasilitas Rapat Kerja	tidak ada	1-2 x setahun	> 2 x setahun			
		0,00	1,00	3,00	3,00		
	b. Notulen Rapat Kerja	tidak ada	ada tidak lengkap	Lengkap			
		0,00	1,00	2,00	2,00		
	c. Rekomendasi KOMIR	tidak ada		ada			
		0,00		4,00	4,00		
	d. Koordinasi dengan Pihak Terkait	tidak ada		ada			
		0,00		2,00	2,00		
	5. Fasilitas Pendukung						
	a. Ruang Kerja Sekretariat	tidak ada		memadai			
		0,00		4,00	4,00		
	b. Kelengkapan Pendukung Lainnya (Peralatan minum, jam dinding, penanggalan,dll)	tidak ada		lengkap			
		0,00		3,00	3,00		
III	PENDANAAN						Max
	1. Operasional						30,00
	1. a. Biaya Operasional KOMIR dan APBD (Honor Pengurus, Kunjungan lapangan, Dll)	tidak ada	kurang	memadai			
		0,00	5,00	15,00	15,00		
	b. Biaya Operasional Sekretariat KOMIR : (Rapat, Listrik, ATK, Komunikasi, Air minum, DLL)	tidak ada	kurang	memadai			
		0,00	2,00	5,00	5,00		
	2. Pertanggungjawaban Anggaran						
	a. Laporan Pertanggung Jawaban	tidak ada	ada hanya untuk pengurus	ada&disampaikan kpd seluruh Anggota			
		0,00	5,00	10,00	10,00		
Total Skor Maksimal							100
Hasil Skor Penilaian							
Kategori Hasil Penilaian: a. Skor 71 < N < 100							Baik
b. Skor 51 ≤ N ≤ 70							Cukup
c. Skor 1 ≤ N ≤ 50							Kurang
NAMA RESPONDEN (Perwakilan Komir)				NAMA ENUMERATOR			
(_____)				(_____)			
Catt: Daftar Hadir Responden FGD terlampir							

Lampiran 4 Kisi-kisi Program Kerja KOMIR

A. Rapat Kerja

1. Penyusunan Pola dan Tata tanam
2. Rencana Pembagian Air
3. Pembahasan Kegiatan OP Tahunan
4. Pembahasan Program RP2I
5. Pembahasan Program P3A/GP3A/IP3A
6. Pembahasan tentang Ijin Alih fungsi Lahan
7. Materi rapat lainnya

B. Rekomendasi

1. Pola dan Tata tanam
2. Rencana Pembagian Air
3. Kegiatan OP Tahunan
4. Persetujuan Program RP2I
5. Program P3A/GP3A/IP3A
6. Tentang Ijin Alih fungsi Lahan
7. Rekomendasi lainnya

C. SK/Kebijakan

1. SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang Rencana Pola dan Tata Tanam
2. SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang Rencana Pembagian Air
3. SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang Kegiatan OP Tahunan
4. SK Bupati tentang RP2I
5. SK Bupati tentang Program P3A/GP3A/IP3A
6. SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang Ijin Alih fungsi Lahan
7. SK lainnya sesuai hasil Rekomendasi KOMIR

D. Supervisi , Monitoring dan Koordinasi

1. Rencana dan Realisasi Supervisi dan Pemantauan di Daerah Irigasi
2. Laporan dan Rekomendasi hasil supervisi.
3. Koordinasi dengan Pihak Lain seperti: Dengan KOMIR Kabupaten Lain, dengan Provinsi, dengan pihak Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga Lainnya yang terkait

E. Pelaporan

1. Notulen Rapat Pembahasan
2. Laporan Kegiatan Tahunan
3. Penyampaian Laporan Kegiatan Tahunan kepada Kepala Daerah

Lampiran 5 Outline Laporan Hasil Pemantauan dan Penilaian Kinerja KOMIR

OUTLINE LAPORAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN KINERJA KOMIR

- I. PENDAHULUAN
 - II. MAKSUD DAN TUJUAN
 - III. METODE KEGIATAN
 - Metode
 - Sasaran
 - Ruang Lingkup
 - Langkah-Langkah Kegiatan
 - Tim Pelaksana
 - Lokasi
 - Waktu Pelaksanaan
 - IV. PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
 - Pemantauan KOMIR
 - Penilaian Kinerja KOMIR
 - V. HASIL KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
 - Hasil Pemantauan KOMIR
 - Hasil Penilaian Kinerja KOMIR
 - VI. PERMASALAHAN UMUM, UPAYA PEMECAHAN MASALAH dan REKOMENDASI
 - VII. RENCANA TINDAK LANJUT
 - VIII. PENUTUP
- LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Taman Makam Pahlawan No 20, Kalibata Jakarta Selatan 12750**